

**Representasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen
(Analisis Kritis tentang Persepsi Aktivistis Perempuan di LSM Perempuan
Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen
pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



OLEH :

IQBAL GUSTIAN

NIM : 16058051/2016

PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Representasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen
(Analisis Kritis tentang Persepsi Aktivistis Perempuan di LSM Perempuan Kota Padang
terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera
Barat)**

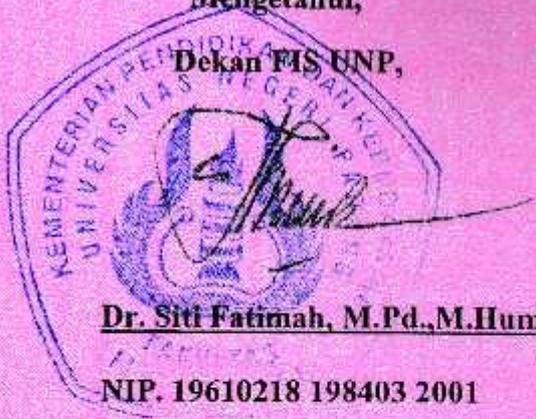
Nama : Iqbal Gustian
Nim/Bp : 16058051/2016
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2020

Disetujui oleh,

Mengetahui,

Dekan FIS UNP,



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum

NIP. 19610218 198403 2001

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several strokes, is written over a horizontal line. The signature is slanted to the right.

Dr. Eka Vidya Putra, S. Sos., M.Si

NIP.19731202 200501 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Sabtu Tanggal 1 Februari 2020

Representasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen

(Analisis Kritis tentang Persepsi Aktivistis Perempuan di LSM Perempuan Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat)

Nama : Iqbal Gustian
Nim/Bp : 16058051/2016
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2020

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Dr. Eka Vidya Putra, S. Sos., M.Si	1. 
2. Anggota	: Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si	2. 
3. Anggota	: Dr. Desy Mardhiah, S.Th.I., S.Sos., M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Gustian
NIM/BP : 16058051/2016
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (SI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Representasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Analisis Kritis tentang Persepsi Aktivistis Perempuan di LSM Perempuan Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat)**" adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Eka Vidva Putra, S. Sos., M.Si
NIP. 19731202 200501 1 001

Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
KASABAH 251210482
5000
REKOR KEMAHIRAN

Iqbal Gustian
NIM/BP. 16058051/2016

ABSTRAK

Iqbal Gustian. 2016. “Representasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Analisis Kritis tentang Persepsi Aktivistis Perempuan di LSM Perempuan Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat)”. Skripsi. Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk mencapai keterwakilan tersebut muncul kebijakan *affirmatif action*. Melalui kebijakan ini keterwakilan perempuan di parlemen dari sisi jumlah meningkat, peningkatan ini butuh beberapa kali Pemilu baru terwujud. Tujuan penelitian untuk mengetahui perspektif aktivis perempuan LSM terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teori representasi oleh Hanna Fenichel Pitkin. Teori Representasi substantif Pitkin yaitu terrepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantif terwujud ketika representator membawa kepentingan pihak yang di wakili ke dalam area kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai harapan aktivis karena budaya patriarki, sistem politik dan kualitas pemilih. Hal tersebut penyebab kebijakan belum pro perempuan. Oleh karena itu aktivis merekomendasikan supaya memberikan pendidikan politik pada masyarakat, meningkatkan kualitas perempuan, memperkuat kerja sama antar organisasi perempuan, melakukan kaderisasi terhadap perempuan, membangun akses dengan media, menyelenggarakan Pemilu yang profesional, dan merangkul generasi milenial.

Kata Kunci: Aktivistis Perempuan, Gender, Parlemen, Representasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya, Sholawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Representasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Analisis Kritis tentang Persepsi Aktivistis Perempuan di LSM Perempuan Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat) ”** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Sosiologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat selesai. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Akmal dan Ibunda Yarnelis(Almarhumah) yang telah merawat, mendidik dan memberikan kasih sayangnya serta dukungan moril, materi, motivasi, dan juga do'a yang tiada hentinya kepada penulis dari dulu sampai sekarang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap keluarga besar di Sungai Pandahan, Pasaman dan Keluarga besar di Balanti, Lubuk Alung yang memberikan dukungan moril, materi, motivasi, dan juga do'a yang tiada hentinya kepada penulis.
3. Adik kandungku tercinta, Reza Ilham dan adik sepupuku yang ter THE BEST Rosi Sriwahyuni yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan serta do'a yang tiada henti, serta yang sudah membantu penulis dalam membuat skripsi ini.
4. Adik-adikku di Balanti, Lubuk Alung (Dhea, Oliv, Meli, Nayla, Arib, Alam, Keysa Fatan dll) dan adik-adik di Pasaman (Yanto, Rohim, Deri, Idep, Fauzan, Sarifah, Selvi, Rehan, Fitriyani, Hana dll) yang telah memberikan motivasi, bantuan dan do'a , serta semangat kepada penulis selama ini.

5. Ibu Selinaswati, S. Sos.,M.A., Ph.D sebagai dosen PA yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam menyelesaikan permasalahan selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S. Sos.,M.Si. sebagai pembimbing serta sebagai Ketua Jurusan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staff dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
8. Ibu Dr. Wirدانengsih S.Sos., M.Si dan Ibu Dr. Desy Mardhiah, S. ThI.,S.Sos., M.Si selaku penguji yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.
9. Ibu Erda Fitriani, S. Sos., M. Si sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama penulis berkuliah di Universitas Negeri Padang.
10. Seluruh Staf administrasi Jurusan Sosiologi, Bang Rhavy, Kak Wezy dan Kak Fifin yang telah melayani dan membantu dalam kelancaran skripsi ini.
11. Semua informan yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yaitu Uni Lusi Herlina, Fitri Yanti, Ramadhaniati, Yefri Heriani, Tanti Herida, dan Rahmi Meri Yenti.
12. Bapak Yoserizal S.Sos selaku Guru Pamong yang telah memberikan pengalaman, motivasi, semangat dan dukungan pada penulis.
13. CEO IYA (Aysah Nur Fitri dan Fatri Yelli Agusti) yang telah memberikan saran, semangat, motivasi, dukungan dan bimbingan pada penulis selama ini.
14. Abang-abang, kawan-kawan dan adik-adik di UKMF Sudut Kampus dan HMJ Sosiologi yang memberikan bantuan, semangat, motivasi dan dukungan.
15. Uni Nirma Wita, kakak-kakak, abang-abang dan kawan-kawan di Pasaman dan Lubuk Alung yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan.

16. Sahabatku Andre Andrianto, Apri Rahman, Fahmi, Wahyu, Fauzan, Ferdinan, Daqor, Alfatah, Deni, Dano, dan sahabat di asrama sakan Gunung Pangilun yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan.
17. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-'Ashry Kuranji dan Pondok Tahfiz Mahasiswa Gunung Pangilun.
18. Kawan-kawan seperjuangan dalam membuat skripsi yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan.
19. Adik-adik dan kawan-kawan *Reference Grup* serta *squad YAKUSA (apri,iyel,wiki,aysah dan wahyu)* yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
20. Teman-teman seperjuangan Guru Muda UNP PLK di SMAN 1 2X11 Enam Lingkung yang memberikan motivasi, dukungan dan semangat.
21. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2016, atas jalinan pertemanan selama masa-masa perkuliahan.
22. Adik-adik mahasiswa UNP angkatan 17,18 dan 19 yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat pada penulis.
23. Adik-adik Squad Abu-abu yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat pada penulis.
24. Siswa-siswi Ter-the Best Bapak di SMA 2X11 Enam Lingkung (Kelas X.IPS 4&5, X.IPA.5, Kelas XI.IPS 1-4) yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat.
25. Semua pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca. Atas segala dukungan dari seluruh pihak penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2020

Iqbal Gustian
16058051/2016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Teoritis	9
F. Studi Relevan	11
G. Penjelasan Konseptual	15
H. Metodologi Penelitian	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Padang	
1. Sejarah.....	29
2. Visi Misi.....	36
3. Keadaan Geografis dan Iklim	37
4. Keadaan Penduduk.....	40
5. Mata Pencaharian.....	41
6. Pendidikan.....	41
7. Agama	44
B. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Kota Padang.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Perspektif Aktivistis Perempuan Terhadap Keterwakilan Perempuan	
di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat.....	56
B. Analisis Teori	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan70
B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Perempuan di DPR RI pada Daerah Pemilihan Sumbar.....	5
Tabel 1.2 Data Jumlah Informan.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Persentase Perbandingan Laki-laki dan Perempuan di DPR RI...4	
Gambar 1.2 Skema Analisis Data Miles dan Huberman.....28	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Pedoman Observasi

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Data Informan

Lampiran 5. Dokumentasi Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterwakilan perempuan di parlemen terus disuarakan oleh berbagai kalangan terutama aktivis perempuan. Bagi mereka keterwakilan perempuan di parlemen layak diperjuangkan karena berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 261,9 juta jiwa. Sebanyak 130,3 juta jiwa atau 49,75% adalah perempuan. Namun paras parlemen Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh laki-laki¹. Tidak hanya dari sisi jumlah, keterwakilan perempuan di parlemen juga layak diperjuangkan karena kompleksitas kepentingan perempuan. Oleh karena itu, perempuan diharapkan hadir di parlemen untuk mempengaruhi kebijakan politik agar muncul kebijakan yang berpihak pada perempuan².

Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dibandingkan laki-laki disebabkan oleh banyak hal. Hal utama yang menjadi sorotan adalah budaya patriarki yang kuat di masyarakat. Dominasi budaya patriarki yang ada di masyarakat seolah memberi garis tegas bahwa perempuan tempatnya bukan di ranah publik tapi pada ranah domestik. Dalam masyarakat kita, perempuan mendapatkan penghormatan yang baik namun mereka tidak diberi tempat untuk ikut serta mengambil keputusan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi atas, laki-laki selalu

¹<http://www.suara.com/new/2019/betapa-maco-dan-tuanya-dpr-ri-para-lelaki-mendominasi-politik-indonesia>. Di akses 28 Agustus 2019

²Very Wahyudi. 2018. *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*. Jurnal Politik Islam. Uinmataram. vol.1 no. 1 (Jan-Jun) 2018

diposisikan paling utama, unggul dan dominan. Sementara perempuan di anggap *second person* setelah laki-laki. Budaya patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, sehingga menimbulkan bias gender³. Karena kondisi ini kesempatan perempuan semakin terbatas, perempuan tidak memiliki nilai tawar dan akses yang lebih untuk bisa berkontribusi dalam menentukan kebijakan publik.

Sadar dengan kondisi di atas, perempuan mulai memperjuangkan keterwakilannya di parlemen. Alasan perempuan berjuang di parlemen karena parlemen adalah tempat membuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang. Aktivis perempuan terus berupaya memperjuangkan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sudah dilakukan dari awal pemerintahan Indonesia dan semakin mengemuka sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998⁴. Berawal dari gerakan reformasi, tuntutan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen semakin gencar untuk diperjuangkan. Sebab reformasi membuka ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan keterwakilannya di parlemen.

Pascareformasi aktivis perempuan semakin gigih berjuang agar jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat. Perjuangan mereka akhirnya diakomodir dalam bentuk kebijakan *affirmatif action* yaitu

³ Siti Nimrah dan Sakaria. *Perempuan dan budaya patriarki dalam politik*. The politics : jurnal magister ilmu politik Universitas Hasanuddin. Vol.1 no 2, juli 2015

⁴M.Fachri Adnan.2012.*Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*.Padang: UNP Pres.hal 1

kebijakan berupa pemberian perlakuan istimewa kepada perempuan yang di rancang sebagai aturan sementara untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam jabatan-jabatan politik, misalnya dalam lembaga legislatif, partai politik dan lembaga penyelenggara Pemilu. *Affirmative action* ini merupakan cara yang dilakukan guna mengatasi kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan⁵.

Kebijakan *affirmatif action* ini direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%⁶. Keterwakilan 30% perempuan di parlemen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum⁷.

Komisi Pemilihan Umum melalui PKPU No.7/2013 menegaskan kembali kewajiban pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif yang diajukan partai politik peserta Pemilu. Peraturan ini secara implisif menyatakan partai politik dalam mengajukan bakal calon

⁵ Hendri Sayuti. *Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)* Menara, Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013

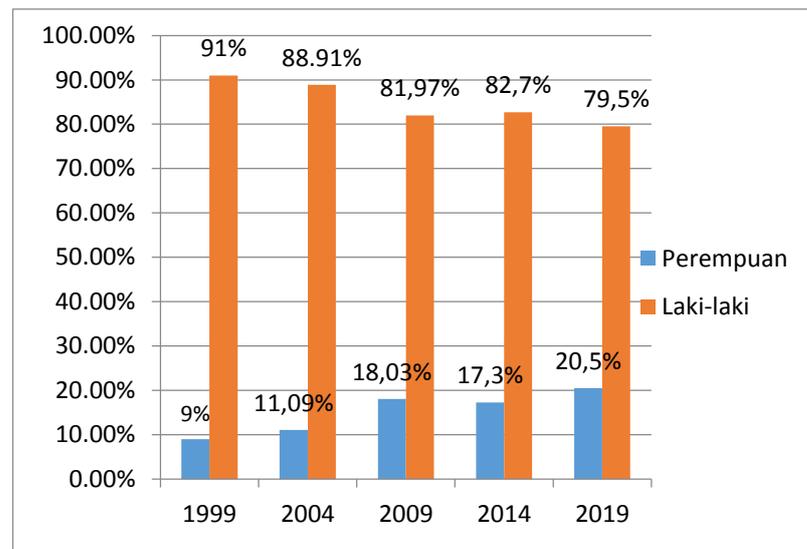
⁶Bena Sri Putmawati. 2016.*Profil Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Periode 2014-2019*.Skripsi.Padang : Universitas Andalas.hal 3

⁷Lidya.2007.*Perempuan Politis Minangkabau Dalam Dunia Politik*. Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 2, April – Juli 2017, 148 - 155

legislatif wajib memperhatikan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan⁸.

Melalui kebijakan *affirmatif action* berupa pemberian kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, jumlah perempuan yang maju sebagai calon legislatif meningkat. Minimal ada 30% perempuan dalam pencalonan pada masing-masing partai politik. Dengan kebijakan *affirmatif action* ini, keterwakilan perempuan di parlemen juga mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 1. Diagram Persentase Perbandingan Laki-laki dan Perempuan di DPR RI



Sumber: <http://www.data-anggota-dpr-ri.pemilu.tempo.com>. Diakses

19 Agustus 2019

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa jumlah perempuan yang duduk di parlemen selalu mengalami peningkatan, kecuali pada Pemilu tahun

⁸Khairul Fahmi. 2016. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta : Rajawali Pers. hal 23

2014 sedikit menurun. Pada Pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan yang cukup tajam yang mencapai angka 20,5% dan merupakan keterwakilan perempuan tertinggi dari Pemilu selama ini.

Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada level nasional juga terjadi pada level lokal Sumatera Barat. Bedanya peningkatan tersebut baru terjadi pada Pemilu tahun 2019. Sebelumnya keterwakilan perempuan di parlemen dari daerah pemilihan Sumatera Barat hanya satu orang. Bahkan pada Pemilu tahun 2004 tidak ada satupun keterwakilan perempuan di parlemen. Pada Pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan meningkat sebanyak 200% dari Pemilu sebelumnya.

Hasil penghitungan suara DPR RI dapil Sumatera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum memunculkan 3 nama perwakilan perempuan di parlemen. Ketiga nama tersebut adalah Nevi Zuarina dari Partai PKS, Athari Gauthy Ardi dari Partai PAN dan Lisda Hendrajoni dari Partai NASDEM. Berikut ini data keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat dari awal reformasi sampai sekarang berdasarkan pernyataan dari pengamat politik Universitas Andalas Aidinil Zetra :

Tabel Daftar Nama Perempuan di DPR RI pada Daerah Pemilihan Sumbar

No.	Tahun	Nama Anggota Legislatif	Partai Politik
1.	1999	-Aisyah Amini	PPP
2.	2004	-	-

3.	2009	- Yulmiar Yandri	DEMOKRAT
4.	2014	-Betty Shadiq Pasadigue	GOLKAR
5.	2019	- Athari Gauthi Ardi	PAN
		- Lisda Hendrajoni	NASDEM
		- Nevi Zuarina	PKS

Sumber:<http://kompas.com.sejarah-terjadi-tigacaleg-perempuan-sumbar-lolos-ke-senayan>.Diakses 27 Mei 2019

Berdasarkan realita di atas menarik untuk mengetahui bagaimana perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat. Agar lebih fokus melihat keterwakilan perempuan di parlemen maka penelitian ini dikaji secara kritis menurut perspektif aktivis perempuan. Peneliti ingin mengetahui perspektif aktivis perempuan karena aktivis perempuan adalah mereka yang secara informal terus memperjuangkan lahirnya *affirmatif action* dan berupaya mendorong supaya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat, sehingga nanti muncul kebijakan-kebijakan yang pro pada perempuan.

Penelitian tentang keterwakilan perempuan di parlemen sudah banyak dilakukan. Namun sejauh informasi yang peneliti ketahui, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tentang bagaimana perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di Parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat. Berikut beberapa penelitian yang relevan menurut penulis, antara lain:

Pertama, skripsi (Bena Sri Putmawati: 2016) berjudul Profil Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Periode 2014-2019. Skripsi ini memberikan referensi baru bagi peneliti tentang keterwakilan perempuan di legislatif. Perbedaannya adalah skripsi ini melihat Profil Anggota Perempuan DPRD Kota Padang sementara peneliti ingin melihat perspektif aktifis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

Kedua, skripsi (Afrina Sari : 2006) berjudul persepsi masyarakat terhadap kuota 30% perwakilan perempuan di legislatif. Skripsi ini memberikan referensi baru bagi peneliti tentang keterwakilan perempuan di legislatif terutama yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Perbedaannya peneliti ingin melihat perspektif aktivis perempuan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat. Sementara skripsi ini melihat persepsi masyarakat terhadap kuota 30% perwakilan perempuan di legislatif.

Ketiga, skripsi (Riris Resita Simamora : 2019) berjudul perempuan dalam politik. Skripsi ini mengkaji tentang keterwakilan perempuan di politik dan strategi untuk mengatasi permasalahan keterwakilan perempuan di legislatif. Sementara peneliti ingin meneliti tentang perspektif aktivis perempuan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada masalah keterwakilan perempuan di parlemen dan perbedaannya terletak pada fokus yang ingin peneliti teliti. Pada penelitian sebelumnya lebih fokus meneliti tentang perempuan di parlemen yang berkaitan dengan profil anggota parlemen perempuan, persepsi masyarakat terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen dan meneliti tentang Undang-Undang kuota 30% di harapkan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara itu fokus penelitian peneliti adalah ingin mengetahui tentang perspektif aktifis perempuan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen.

Berdasarkan relevansi diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat di pemilu 2019 mengalami peningkatan sebanyak 200% dari Pemilu sebelumnya. Pada periode sebelumnya keterwakilan perempuan hanya diwakili oleh satu orang, bahkan pada periode 2004 tidak ada perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat. Keberhasilan keterwakilan perempuan di parlemen tidak lepas dari keberadaan aktivis perempuan yang dari awal sampai sekarang terus memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam konteks itu menarik untuk

dilihat bagaimana perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui Perspektif Aktivis Perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan wawasan keilmuan terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen dan mengenai perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.
2. Praktis: sebagai bahan rujukan dan informasi oleh peneliti selanjutnya mengenai topik dan permasalahan yang sama melalui sudut pandang sosiologis.

E. Kajian Teoritis

Teori yang relevan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi oleh Hanna Fenichel Pitkin. Hanna F. Pitkin menjelaskan bahwa

representasi merupakan bentuk modern dalam demokrasi, dan menjelaskan representasi dalam beberapa hal, namun pada penelitian ini peneliti menggunakan teori representasi substantif yang dikemukakan oleh Pitkin. Representasi substantif yaitu terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantif terwujud ketika representator membawa kepentingan pihak yang di wakili ke dalam area kebijakan publik.

Representasi substantif diartikan sebagai bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili, dengan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan untuk kepentingan yang diwakilinya. Pandangan representasi secara substantif menekankan pentingnya keterkaitan antara yang mewakili dan yang diwakili. Pihak yang mewakili dapat dikatakan benar-benar menghadiri kembali pihak yang diwakilinya lewat keberpihakan dan pembelaan terhadap kepentingan yang diwakili⁹.

Alasan peneliti menggunakan teori representasi substantif Pitkin karena dalam representasi substantif dijelaskan bahwa untuk mewujudkan representasi sebagaimana yang diharapkan, pihak yang mewakili atau representator yang dalam hal merupakan anggota parlemen perempuan harus mampu untuk membuat kebijakan yang berpihak pada perempuan. Agar adanya kebijakan yang pro pada perempuan maka perlu parlemen perempuan yang secara kuantitas dan kualitas bagus. Pada Pemilu tahun 2019 ini keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat

⁹ www.journal.unair.ac.id/dwi_windyastuti.politik_representasi_perempuan. Diakses 9 Februari 2020

mengalami peningkatan dan menunjukkan angka tertinggi dibanding Pemilu sebelumnya. Melalui peningkatan ini apakah mampu untuk merepresentasikan keterwakilan yang di harapkan selama ini, hal inilah yang nantinya akan peneliti kaji dalam penelitian ini. Apakah menurut aktivis perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada periode ini sudah sesuai harapan dan mampu merepresentasikan dalam bentuk membuat kebijakan yang berpihak pada perempuan.

F. Studi Relevan

Pertama, skripsi (Bena Sri Putmawati: 2016) berjudul Profil Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Periode 2014-2019. Skripsi ini memberikan referensi baru bagi peneliti tentang keterwakilan perempuan di legislatif, skripsi ini mengkaji tentang perempuan di DPRD Kota Padang. Persamaannya dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang keterwakilan perempuan di legislatif, sementara Perbedaannya adalah skripsi ini melihat Profil Anggota Perempuan DPRD Kota Padang sementara peneliti ingin melihat perspektif aktifis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

Melalui skripsi ini peneliti memperoleh informasi dan pemahaman tentang perempuan di parlemen terutama dari profil mereka, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perempuan yang duduk di DPRD Kota Padang secara latar belakang hampir semuanya memiliki pendidikan yang baik, didukung oleh ekonomi yang baik dan keluarga yang telah aktif di dunia politik. Skripsi ini

membantu peneliti mengembangkan pola pikir dalam mengkaji tentang keterwakilan perempuan di parlemen yaitu mereka maju untuk menjadi anggota legislatif karena termotivasi untuk memajukan perempuan khususnya di dunia politik.

Kedua, skripsi (Afrina Sari : 2006) berjudul persepsi masyarakat terhadap kuota 30% perwakilan perempuan di legislatif. Skripsi ini memberikan referensi baru bagi peneliti tentang keterwakilan perempuan di legislatif terutama yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Menurut persepsi masyarakat kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif merupakan salah satu bentuk konkrit agar keterwakilan perempuan di parlemen dapat meningkat dan masyarakat menyambut positif kebijakan tersebut. Melalui pemberian kuota tersebut harapannya keterwakilan perempuan dapat meningkat sehingga nanti muncul kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan.

Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama ingin mengkaji tentang perspektif terutama yang berkaitan perempuan di legislatif, sementara perbedaannya peneliti ingin melihat perspektif aktivis perempuan LSM terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat, sedangkan skripsi ini melihat persepsi masyarakat terhadap kuota 30% perwakilan perempuan di legislatif.

Ketiga, skripsi (Riris Resita Simamora : 2019) berjudul perempuan dalam politik. Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman bagi peneliti tentang perempuan dalam ranah politik. Dalam hal ini perempuan

cenderung mengalami beragam hambatan untuk bisa terjun ke ranah politik, mulai dari rendahnya finansial yang dimiliki perempuan, sistem politik yang kurang berpihak pada perempuan dan menempatkan perempuan di nomor urut bawah dan lain sebagainya jadi hambatan perempuan bisa berkontribusi lebih dalam ranah politik. Pada ranah politik perlu adanya perempuan agar nantinya kebijakan yang di hasilkan bisa lebih berpihak pada perempuan dan permasalahan perempuan yang mampu teratasi.

Persamaan dengan peneliti yaitu sama mengkaji tentang perempuan dalam ranah politik semetara perbedaannya yaitu skripsi ini mengkaji tentang keterwakilan perempuan di politik dan strategi untuk mengatasi permasalahan keterwakilan perempuan di legislatif. Sementara peneliti ingin meneliti tentang perspektif aktivis perempuan LSM terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

Keempat, skripsi (Siti Maya Sari : 2016) berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan 11 Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015. Skripsi ini memberikan wawasan bagi peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif. Pandangan masyarakat terhadap partisipasi perempuan di legislatif sudah baik, masyarakat menginginkan adanya partisipasi perempuan di dalam politik khususnya di keanggotaan legislatif agar nantinya mereka dapat membuat kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.

Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang persepsi terhadap perempuan di politik, sementara perbedaannya adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif sementara peneliti ingin mengetahui tentang persepsi aktivis perempuan LSM terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

Kelima, Jurnal politik (Yudi Irawan, Adelina Hasyim : 2014) dengan judul Persepsi Tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalangan Ibu Rumah Tangga. Jurnal ini menambah wawasan dan memberikan pola pikir baru bagi peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap calon anggota DPRD yang berasal dari kalangan ibu rumah tangga. Jurnal ini mengemukakan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Sikincau, Kecamatan Sikincau Lampung Barat tentang munculnya calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga adalah mayoritas masyarakat cenderung kurang setuju dengan munculnya calon dari kalangan ibu rumah tangga, karena menurut masyarakat ibu rumah tangga seharusnya berperan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga.

Persamaannya dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang persepsi yang berhubungan perempuan dan politik, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap calon anggota DPRD dari kalangan ibu rumah tangga sementara peneliti ingin mengkaji tentang persepsi aktivis perempuan LSM terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

G. Penjelasan Konsep

1. Legislatif

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu Parlemen, Kongres, dan Asembli Nasional. Fungsi dan hak lembaga legislatif antara lain mengajukan rancangan Undang-Undang, hak untuk mengubah setiap rancangan Undang-Undang yang di ajukan leh pemerintah, bahkan DPR juga berhak menolak rancangan Undang-Undang yang di ajukan oleh pemerintah. Fungsi lain adalah fungsi anggaran yaitu mengurangi ataupun mengubah anggaran dari apa yang di ajukan oleh pemerintah¹⁰.

Berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan, kekuasaan legislatif ada di DPR, (pasal 20 ayat 1). DPR juga diberikan kekuasaan dalam bentuk pemberian persetujuan apabila presiden hendak membuat perjanjian dengan negara lain, menyangkut bidang perekonomian, perjanjian damai, menyatakan perang serta perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap integritas wilayah dan lain-lain¹¹. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menegaskan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji¹². Salah satu lembaga legislatif yang

¹⁰<http://fisip.ui/lembaga-legislatif/> Cecep Hidayat Di akses tanggal 29 Desember 2019

¹¹Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, halaman 108

¹²Loc.cit

ingin peneliti bahas adalah Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), lembaga legislatif ini terdiri dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang keterwakilan perempuan di DPR RI yang menjadi fokus peneliti adalah perspektif aktivis perempuan LSM terhadap perempuan yang lolos ke parlemen.

2.Representasi

Representasi substantif diartikan sebagai bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili, dengan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan untuk kepentingan yang diwakilinya. Pandangan representasi secara substantif menekankan pentingnya keterkaitan antara yang mewakili dan yang diwakili. Pihak yang mewakili dapat dikatakan benar-benar menghadiri kembali pihak yang diwakilinya lewat keberpihakan dan pembelaan terhadap kepentingan yang diwakili¹³. Representasi juga dapat diartikan sebagai perwakilan yaitu seseorang yang bertindak berdasarkan apa yang diwakilinya, dalam hal ini seorang anggota parlemen harus dapat bertindak dan melakukan perbuatan terhadap apa yang diwakili yaitu rakyat. Anggota parlemen perempuan harus bekerja keras untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan membuat kebijakan yang tidak mendiskriminasi perempuan.

3. Gender

Gender adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan peran, fungsi, serta pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Secara umum

¹³www.journal.unair.ac.id/dwi_windyastuti.politik_representasi_perempuan. Diakses 9 Februari 2020

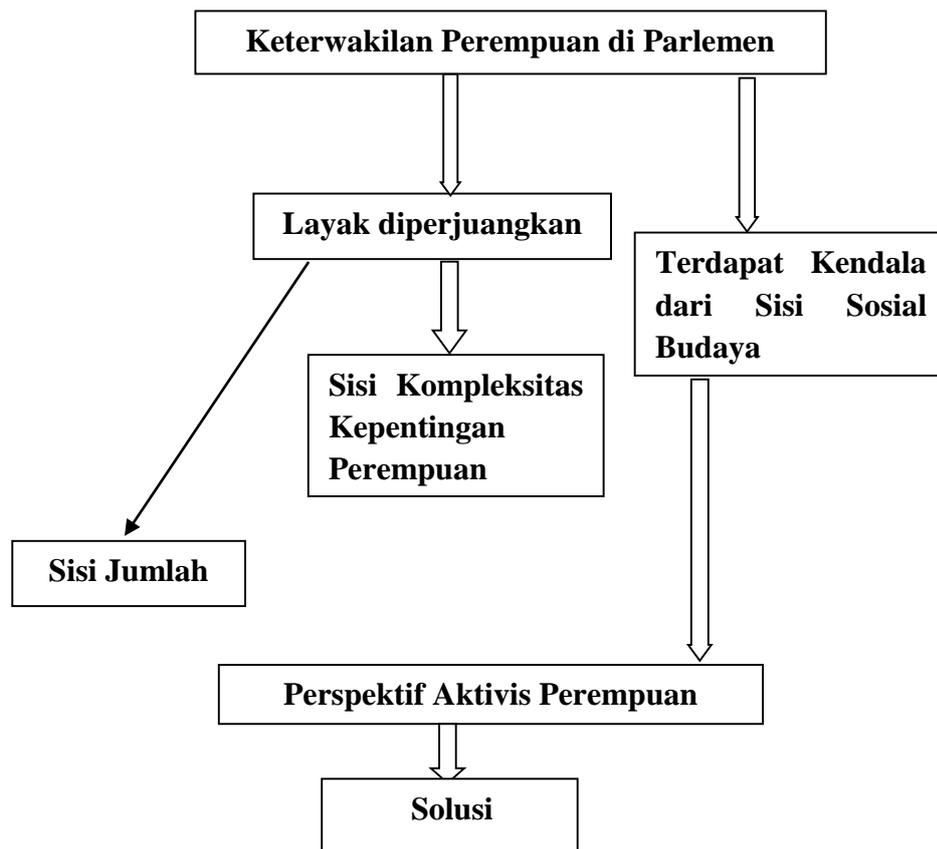
pembagian kerja disusun berdasarkan anggapan tertentu mengenai laki-laki dan perempuan sebagai pelaksana aktivitas kemasyarakatan. Namun, anggapan tertentu itu dalam benak sebagian besar anggota masyarakat, lebih didasarkan pada perbedaan fisik laki-laki dan perempuan yang diasumsikan pada karakteristik psikis dan intelektual laki-laki memiliki sejumlah keunggulan komparatif dibanding perempuan¹⁴.

Struktur sosial dengan perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. Sebagai struktur sosial, gender menekankan peran dan fungsi ideal laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya, gender memilah-milah peran dan fungsi mereka. Laki-laki di idealisasikan berperan di ranah publik sedangkan perempuan di ranah domestik¹⁵. Konsep gender yang dapat peneliti simpulkan adalah konstruksi yang bangun oleh masyarakat terhadap jenis kelamin yang berhubungan dengan peran, fungsi dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan misalnya laki-laki itu di konstruksikan oleh masyarakat kuat, pemberani, tegas sementara perempuan itu lemah, penakut, penangis dan cengeng. Hal inilah yang nantinya menjadikan adanya perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi dan pembagian kerja.

Berdasarkan penjelasan konsep tersebut, maka dapat dijelaskan kerangka berpikir yang ingin peneliti gambarkan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴Misbah Zulfa Elizabeth.2018.*Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*.Depok: Pustaka LP3ES.hal 15

¹⁵Ibid,hal 17



H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena di kota Padang ini terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan tentunya dalam Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut terdapat aktivis perempuan yang bisa jadi narasumber peneliti.

2. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena permasalahan dalam penelitian ini bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam. Fokus dalam penelitian ini yaitu melihat perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah rancangan penelitian yang mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas serta peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan¹⁶. Tipe studi kasus yang digunakan adalah tipe studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik menekankan pada pemahaman (*verstehen*) yang mendalam¹⁷. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

3. Informan penelitian

Metode dalam pemilihan informan menggunakan *teknik purposive*, yaitu subyek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diambil berdasarkan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui perspektif aktivis perempuan LSM terhadap keterwakilan perempuan di

¹⁶John, W. Cresswell. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal: 19

¹⁷Muhammad, Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, hal: 58

parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat. *Teknik purposive sampling* disini dipakai agar peneliti mendapat kemudahan memperoleh informan.

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pekerjan
1.	Lusi Herlina	54 tahun	Perempuan	Fasilitator Masalah Perempuan dan gender
2.	Fitri Yanti	53 tahun	Perempuan	Wakil Ketua Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Pemberdayaan Perempuan dan anak Provinsi Sumatera Barat
3.	Ramadhaniati	53 tahun	Perempuan	Direktur Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Sumbar
4.	Tanty Herida	41 tahun	Perempuan	Sekwil KPI wilayah Sumbar
5.	Yefri Heriani	40 tahun	Perempuan	Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar
6.	Rahmi Meri Yenti	30 tahun	Perempuan	PLT Direktur Nurani Perempuan

Sumber : Data penelitian tahun 2019

Berdasarkan data jumlah informan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan 6 orang informan yang peneliti pilih, meliputi aktivis perempuan di Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang. Pemilihan informan penelitian bukan berdasarkan banyak orang yang di perlukan dalam pengambilan data, melainkan pada siapa saja yang lebih banyak mengetahui informasi penting dalam penelitian sehingga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih informan. Dalam hal ini peneliti memilih

6 orang informan tersebut karena mereka merupakan aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini fokus mengkaji tentang masalah perempuan dan memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Kriteria pemilihan informan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Informan penelitian adalah orang-orang yang menjadi aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terus mengkaji tentang isu-isu perempuan dan gender. Dan juga memiliki rekam jejak memperjuangkan masalah perempuan.

2. Peneliti juga mengambil informasi lain yang berasal dari instansi pemerintahan untuk mendukung penelitian ini seperti data dari Komisi Pemilihan Umum. Informan ini dipilih untuk mengetahui keterwakilan perempuan di parlemen dari tahun ke tahun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis pada penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan¹⁸. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada

¹⁸Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta, hal: 224

observasi berperan serta (*partisipant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi¹⁹.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif²⁰. Dalam hal ini peneliti mengamati keterwakilan perempuan melalui media elektronik yaitu dengan mengamati keterwakilan perempuan di parlemen pada berita-berita online. Pada saat observasi peneliti mengamati keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibanding Pemilu sebelumnya baik di tingkat Nasional maupun lokal Sumatera Barat.

b. Wawancara

Menurut Estenberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²¹. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara secara terstruktur untuk mengetahui dengan pasti informasi mengenai perspektif aktivis perempuan terhadap keterwakilan perempuan Sumbar di parlemen.

¹⁹*Ibid*, hal: 225

²⁰*Ibid*, hal: 227

²¹*Ibid*, hal: 231

Pada wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrumen penilaian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya. Selain membawa instrumen penelitian, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar²².

Peneliti melakukan wawancara dengan 6 orang informan tidak mengalami hambatan yang sulit. Wawancara dilakukan dari pagi hingga siang dan ada juga sampai malam hari. Penelitian dilakukan di kantor LSM Nurani Perempuan, kantor Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan Sumbar, dan kantor Ombudsman Sumbar. Selain di kantor, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan di kampus Universitas Negeri Padang dan di lobi Hotel Pangeran City. Kemudian peneliti juga mengunjungi rumah informan untuk melakukan wawancara. Informan yang peneliti temui bersifat terbuka dan kooperatif, sehingga peneliti bisa mendapatkan data dan informasi yang di perlukan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara

²²*Ibid*,hal: 233

akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh studi dokumen²³. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, berita, serta data tertulis berupa data Kota Padang.

4. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi adalah suatu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi yang lebih akurat dan kredibel²⁴. Triangulasi sumber merupakan pengambilan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama²⁵. Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan pertanyaan yang serupa kepada informan yang telah ditetapkan. Data yang sudah peneliti analisis hingga menghasilkan kesimpulan, selanjutnya diambil kesepakatan (member check) dengan sumber data yang telah ditetapkan²⁶. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Triangulasi sumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat adalah aktivis melihat keterwakilan perempuan di parlemen secara kualitas belum sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan selama ini.

²³ *Ibid*, hal: 240

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hal 327.

²⁶ *Ibid*, hal: 274

Keterwakilan perempuan hanya meningkat secara kuantitas namun secara kualitas masih belum sesuai dengan harapan aktivis.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh²⁷.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti mencatat, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting serta dicari tema dan polanya²⁸. Reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan hasil temuan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat

²⁷*Ibid*, hal: 246

²⁸*Ibid*.hal: 247

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan²⁹.

Setelah melakukan penelitian, peneliti akan mereduksi data. Langkah pertama yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian langkah kedua, peneliti mengelompokkan data tersebut sesuai dengan pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya, langkah ketiga, peneliti memfokuskan proses pemilihan data yang relevan dan mengarahkan data sesuai dengan perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat, serta membuang data yang tidak diperlukan. Terakhir, semua data yang telah dikumpulkan disatukan. Lalu dibuat kesimpulan sementara secara singkat mengenai perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah data disajikan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk teks yang bersifat narasi dan deskripsi. Melalui penyajian data akan terorganisasi dan tersusun. Sehingga akan mudah untuk dipahami³⁰. Penyajian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana data yang dikumpulkan lebih pada bentuk kata-kata. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk pembahasan

²⁹*Ibid*, hal: 249

³⁰*Ibid*

masalah yaitu Bagaimana perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat.

3. Verifikasi data

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh masih merupakan dugaan sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada saat pengumpulan data³¹. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru, dapat berupa deskripsi suatu fenomena yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian maka akan menjadi jelas. Data yang sudah disajikan sebelumnya bila telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel³².

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data sudah terkumpul secara keseluruhan. Sebelumnya, penarikan kesimpulan sudah diambil terlebih dahulu oleh peneliti yang bersifat sementara, ketika data yang diperoleh cukup memadai. Setelah peneliti telah mendapatkan data yang lengkap, maka akan diambil kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

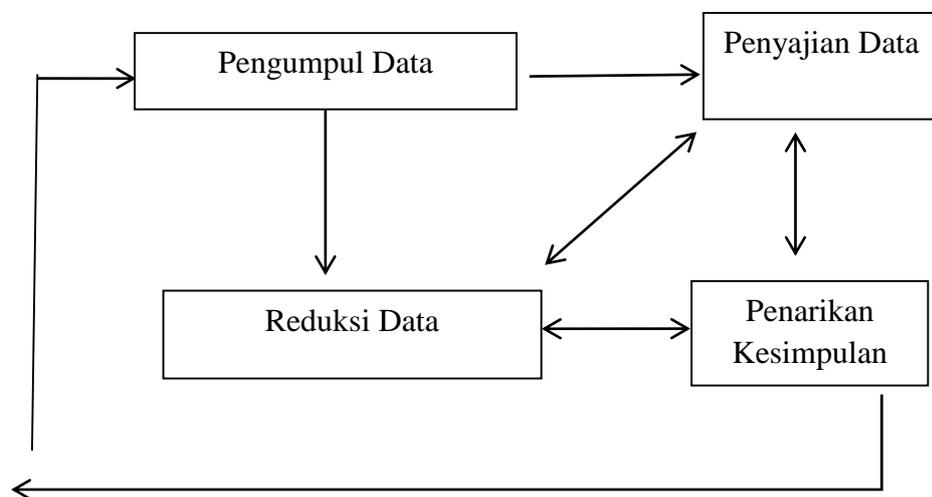
Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera

³¹*Ibid*, hal:252

³²*Ibid*, hal: 253

Barat adalah aktivis melihat keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai dengan harapan. Aktivis menginginkan keterwakilan perempuan di parlemen meningkat secara kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu aktivis memberikan beberapa rekomendasi agar keterwakilan perempuan dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Analisis interaktif oleh Miles dan Huberman dapat digambarkan pada bagan berikut :



(Gambar 1.1 Skema Analisis Data Miles dan Huberman)